



Jaringan Perdagangan Garam di Sumenep Abad ke-19

Syifaul Qalbiyah*, Ari Sapto, Daya Negri Wijaya

Universitas Negeri Malang, Indonesia

*syifaul.qalbiyah.2507318@students.um.ac.id

Abstract

Since the nineteenth century, Sumenep has served as an important center of salt production and trade in Madura within the maritime economy of the Dutch East Indies. Its strategic geographical location, the availability of port facilities, and the maritime activities of local communities enabled Sumenep to be integrated into inter-island trade networks across the region. Nevertheless, studies on Sumenep's role in the salt trade routes have tended to focus primarily on economic aspects and colonial policies, leaving the strategic significance of this area insufficiently explored from a maritime historical perspective. This research aims to reconstruct the salt trade network of Sumenep in the nineteenth century by emphasizing the role of ports, trade actors, and the relationship between colonial regulations and the economic activities of coastal communities. The study employs a historical method consisting of topic selection, heuristics, source verification, interpretation, and historiography. Research data are derived from Dutch-language colonial newspaper archives, colonial government reports, and relevant historical literature. The findings reveal that the Port of Sumenep functioned as a collecting center linking salt-producing areas with regional trade networks within the framework of the colonial monopoly system. Trade activities involved salt producers, intermediary traders, traditional maritime shipping, and colonial authorities, while informal trade routes emerged as strategies of economic adaptation and resistance among coastal communities. The study concludes that salt trade activities in Sumenep were not merely a representation of colonial power but also reflected dynamic processes of negotiation and local economic resilience in response to the colonial monopoly system.

Keywords: *Trade; Salt; Sumenep; Madura; Dutch Colonialism*

Abstrak

Sejak abad ke-19 Sumenep menjadi pusat penting dalam produksi dan perdagangan garam di Madura dalam perekonomian maritim Hindia Belanda. Letak geografis yang strategis, ketersediaan pelabuhan, dan kegiatan pelayaran penduduk membuat Sumenep terhubung dengan jaringan perdagangan antarpulau di kawasan tersebut. Meskipun demikian, studi tentang peranan Sumenep dalam jalur perdagangan garam cenderung fokus pada aspek ekonomi dan kebijakan penjajah, sehingga belum mengeksplorasi secara mendalam posisi strategis daerah ini dari sudut pandang sejarah maritim. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyusun kembali gambaran jaringan perdagangan garam Sumenep di abad ke-19 dengan fokus pada peran pelabuhan, pelaku-pelaku perdagangan, dan hubungan antara regulasi kolonial dengan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Metode yang digunakan adalah metode historis yang meliputi tahapan pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Data penelitian berasal dari arsip koran kolonial berbahasa Belanda, dokumen laporan pemerintah kolonial, dan rujukan sejarah terkait. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pelabuhan Sumenep berperan sebagai pusat pengumpulan yang menghubungkan kawasan

produksi garam dengan jaringan perdagangan regional dalam kerangka monopoli kolonial. Aktivitas perdagangan melibatkan produsen garam, pedagang penghubung, pelayaran tradisional, dan aparatur kolonial, di mana jalur perdagangan tidak resmi muncul sebagai strategi penyesuaian dan perlawanan ekonomi komunitas pesisir. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan garam di Sumenep bukan sekadar representasi kekuasaan kolonial, melainkan juga menampilkan dinamika perundingan dan daya tahan ekonomi lokal dalam menghadapi sistem monopoli penajah.

Kata Kunci: Perdagangan; Garam; Sumenep; Madura; Kolonialisme Belanda

Pendahuluan

Kondisi geografis dan ekologis kabupaten pesisir Madura, khususnya Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, sangat kondusif bagi produksi garam rakyat (Muflilha et al., 2021). Keberadaan Madura di timur laut Jawa, dengan Laut Jawa di utara dan Selat Madura di selatan, memberikan peran strategis bagi wilayah ini dalam dinamika keperluan dan ekonomi maritim Nusantara (Widyanti & Setiyonugroho, 2022). Dalam konteks lokal, hasil penelitian di Desa Pinggir Papas, Sumenep, mengkonfirmasi bahwa karakteristik perairan dan pesisir setempat memenuhi syarat untuk produksi garam masyarakat (Romdana et al., 2020). Perkembangan produksi garam di Madura sejak abad ke-19 mengalami peningkatan yang signifikan seiring implementasi kebijakan ekonomi kolonial oleh VOC melalui sistem perpajakan tidak langsung dan regulasi produksi, yang memicu ekspansi tambak garam di wilayah Madura (Syafi'i, 2013). Berdasarkan data kartografis tahun 1915, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep tercatat sebagai tiga lokasi produksi garam primer, sementara aktivitas transportasi garam memberikan kontribusi substansial bagi perekonomian masyarakat (Mahdiyar et al., 2022).

Posisi Sumenep sebagai salah satu sentra produksi garam terbesar di Madura cukup menonjol dalam konteks tersebut. Rekam jejak historis sekitar tahun 1894 memperlihatkan partisipasi tenaga kerja dalam produksi garam yang mencapai rata-rata 10.600 orang (Jonge, 2011). Lokasi Sumenep di ujung timur Pulau Madura, dengan batasan geografis meliputi Laut Jawa, Selat Madura, dan wilayah Pamekasan, memberikan kondisi yang menguntungkan bagi dinamika pelayaran dan perdagangan (Sari & Wisnu, 2022). Fungsi pelabuhan utama di Sumenep meliputi peran sebagai pelabuhan transit dan jaringan perdagangan jarak jauh ke kawasan timur Indonesia (Mahmudah, 2018). Karakteristik garam sebagai komoditas strategis dalam konsumsi dan sektor industri menghasilkan permintaan yang terus mengalami kenaikan Yogana (2016) yang kemudian memotivasi pemerintah Hindia Belanda untuk mentransformasi Sumenep menjadi kawasan industri melalui pembangunan infrastruktur produksi, pabrik briket garam, serta perusahaan jasa transportasi darat dan maritim (Mahmudah, 2018). Sistem monopoli kolonial yang membatasi akses petani terhadap produksi dan distribusi garam menjadi faktor yang tidak terpisahkan dari perkembangan tersebut. Penelitian historis membuktikan bahwa kebijakan monopoli ini telah membentuk struktur pergaraman yang tidak seimbang di Sumenep (Muflilha et al., 2021).

Konsekuensi jangka panjangnya masih dapat diamati hingga masa kini, yang meliputi rendahnya daya tawar petani Anas (2025) pengaruh biaya dan kualitas produksi terhadap tingkat penghasilan Amaliyah & Nugroho (2024) dinamika produktivitas yang dipengaruhi oleh faktor teknis dan ekologis Ismawati et al., (2020) serta dorongan ekonomi dan kultural yang menjaga keberlanjutan keterlibatan petani dalam sektor pergaraman (Hasan et al., 2023). Di samping itu, sistem pemasaran garam di Madura masih dikarakterisasi oleh struktur pasar dengan pembeli terbatas yang memberikan posisi dominan kepada pedagang perantara (Utomo & Vibriyanto, 2024).



Gambar 1. Peta Madura, Adriaan Jan Bogaerts

(Sumber: Kaart van Java en Madoera, rechterdeel [Map], 1850)

Studi tentang garam Madura selama ini didominasi penelitian yang menekankan aspek ekonomi, pengelolaan produksi, dan dampak kebijakan pada kesejahteraan petani, baik pada masa kolonial maupun pascakolonial (Ismawati et al., 2020; Muflilha et al., 2021; Widiyanti & Setiyonugroho, 2022; Anas, 2025; Amaliyah & Nugroho, 2024). Dalam perspektif sejarah, fokus penelitian umumnya terbatas pada regulasi kolonial dan perlawanan petani terhadap monopoli (Muflilha et al., 2021). Keterbatasan utama studi-studi ini adalah belum menempatkan Sumenep sebagai simpul jaringan perdagangan garam abad ke-19 dalam kerangka sejarah maritim, khususnya dalam mengkaji hubungan antara birokrasi kolonial, pelabuhan kecil, pedagang lokal, dan jalur distribusi regional.

Mengacu pada kesenjangan penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis posisi strategis Sumenep dalam jaringan perdagangan garam abad ke-19 menggunakan perspektif sejarah ekonomi maritim. Upaya penelitian ini diarahkan untuk menelusuri hubungan antara kebijakan kolonial, infrastruktur pelabuhan, dan pelaku ekonomi lokal yang membentuk pola produksi serta distribusi garam, sekaligus menjelaskan peran garam sebagai komoditas penghubung dinamika ekonomi, sosial, dan politik di kawasan pesisir Madura.

Metode

Pendekatan historis diterapkan dalam studi ini untuk merekonstruksi jaringan perdagangan garam di Sumenep pada abad ke-19 secara sistematis dan kritis berdasarkan data empiris terverifikasi melalui lima tahapan yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Fokus pemilihan topik diarahkan pada jaringan perdagangan garam dengan memposisikan Sumenep sebagai simpul strategis produksi dan kepelabuhanan dalam kerangka sejarah maritim kolonial. Pengumpulan sumber pada tahap heuristik mencakup arsip sumber primer berupa surat kabar kolonial berbahasa Belanda abad ke-19 yang memuat informasi produksi, distribusi, dan perdagangan garam seperti *Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad* (27 Desember 1894), *Soerabaijasch Handelsblad* (18 September 1886), dan *De Locomotief* (17 Juli 1897) serta sumber sekunder berupa karya ilmiah dan literatur sejarah relevan. Proses verifikasi atau kritik sumber melibatkan kritik eksternal untuk menelusuri latar penerbitan, orientasi media, dan konteks politik-ekonomi kolonial, serta kritik internal untuk menganalisis substansi berita, pilihan diksi, dan kecenderungan perspektif kolonial yang mengutamakan kepentingan pemerintah dan pelaku ekonomi Eropa. Melalui prosedur ini, data diseleksi berdasarkan validitas, konsistensi, dan relevansinya dengan fokus penelitian. Pengolahan data terverifikasi pada tahap interpretasi bertujuan memetakan pola relasi antarpelaku perdagangan garam, meliputi keterkaitan antara birokrasi kolonial, pelabuhan Sumenep, pedagang perantara, sarana transportasi, dan jalur

distribusi antarpulau, yang memungkinkan analisis Sumenep sebagai komponen penting dari jaringan perdagangan garam dalam sistem ekonomi maritim kolonial. Dominasi sumber arsip kolonial diatasi melalui pembacaan kritis, komparasi antararsip, dan triangulasi dengan literatur sekunder. Tahap historiografi menyajikan hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis dan analitis mengenai dinamika kota pelabuhan Sumenep, struktur birokrasi ekonomi-politik kolonial, dan jaringan perdagangan garam pada abad ke-19.

Hasil dan Pembahasan

1. Kota Pelabuhan Sumenep

Sumenep mengalami perkembangan sebagai pusat perdagangan terpenting di wilayah timur Madura pada abad ke-19, dengan pasar menjadi yang tersibuk di pulau tersebut (Mahmudah, 2018). Karakter kosmopolitan Sumenep tercermin dalam data demografis ekonomi tahun 1862 yang mencatat keberadaan 4.300 pedagang dari beragam etnis Tionghoa, Arab, Melayu, Bengali, dan Keling serta ribuan pengrajin dan pekerja di luar sektor pertanian (Muflilha et al., 2021). Profil demografis ini membuktikan bahwa Sumenep telah menjalankan fungsinya sebagai simpul interaksi ekonomi dan sosial dalam jaringan perdagangan regional sejak abad ke-19 (Widyanti & Setiyonugroho, 2022).

Pelabuhan Sumenep memiliki signifikansi strategis dalam perdagangan garam sebagai simpul distribusi yang mengoneksikan kawasan produksi garam seperti Kalianget, Talango, Pragaan, dan Saronggi dengan pelabuhan-pelabuhan di pesisir Jawa Timur (Hasan et al., 2023). Fungsi distribusi pendukung diperankan oleh pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitarnya sebagai simpul yang memfasilitasi aliran garam dan komoditas pesisir secara berlapis (Parwoto & Hartono, 2018). Kondisi ekologis kawasan timur Madura yang beriklim kering dan mendukung produksi garam melalui evaporasi alami memperkuat keberlanjutan fungsi ini, sehingga tercipta kesinambungan antara aktivitas produksi dan distribusi sejak masa kolonial (Sari & Wisnu, 2022).

Peran pelayaran rakyat tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perdagangan garam di Sumenep. Sebagai penggerak utama distribusi antarpulau sebelum dominasi kapal Eropa, sistem pelayaran lokal Madura mengoperasikan kapal-kapal tradisional yang secara rutin mengangkut garam ke Surabaya, Gresik, Kalimantan, hingga Sulawesi (Razy, 2023). Dokumentasi dalam arsip *Soerabaijsch Handelsblad* (18 September 1886) mengenai lonjakan pengangkutan garam pada musim kemarau menegaskan fungsi pelabuhan Sumenep sebagai pusat pemusatkan distribusi garam produksi lokal.

Pelabuhan Sumenep di sisi lain juga menjalankan fungsi sebagai instrumen kontrol kolonial. Dokumentasi dalam arsip *De Locomotief* (17 Juli 1897) memperlihatkan bahwa pelabuhan ini berada di bawah pengawasan langsung *Departement van Financiën*, yang menerapkan sistem perizinan ketat dan kewajiban pelaporan muatan ke *zoutmagazijn* Surabaya sebagai komponen kebijakan monopoli garam (Parwata & Padmo, 1997). Kendati demikian, inisiatif ekonomi lokal tidak sepenuhnya tereliminasi oleh kontrol birokratis ini. Praktik perdagangan garam ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan kecil sebagai bentuk respons terhadap harga dan regulasi kolonial yang merugikan masyarakat pesisir tercatat dalam sejumlah arsip kolonial (*Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad*, 27 Desember 1894).

Struktur perdagangan garam di Sumenep bersifat ganda, sebagaimana ditunjukkan oleh keberadaan jaringan perdagangan informal, yakni jaringan formal yang berada di bawah kendali negara kolonial dan jaringan informal yang dioperasikan oleh aktor lokal melalui relasi sosial dan pelayaran rakyat (Muflilha et al., 2021). Pelabuhan Sumenep dalam konteks ini tidak sekadar menjalankan fungsi sebagai infrastruktur ekonomi, melainkan menjadi tempat negosiasi antara kekuasaan kolonial dan strategi

bertahan hidup komunitas pesisir (Razy, 2023). Bagaimana jaringan perdagangan garam terbentuk melalui interaksi antara regulasi, kekuasaan, dan praktik ekonomi lokal tercermin dalam relasi patron-klien, dominasi pedagang perantara, serta keterlibatan beragam kelompok etnis maritim (Widyanti & Setiyanugroho, 2022).

Perspektif maritim Asia Tenggara menurut Leong Sau Heng (1990) yang diintegrasikan tidak berhenti pada klasifikasi fungsi pelabuhan, melainkan menegaskan pelabuhan Sumenep sebagai ruang dinamis di mana jaringan perdagangan formal dan informal saling berinteraksi. Struktur ekonomi maritim yang kompleks terepresentasikan dalam perdagangan garam di Sumenep abad ke-19, di mana hegemoni kolonial terus dinegosiasikan melalui kreativitas ekonomi masyarakat pesisir, sehingga memungkinkan aktor lokal tetap berperan aktif dalam jejaring maritim regional meskipun beroperasi dalam sistem kolonial yang berlapis dan timpang (Atikurrahman et al., 2021).

2. Birokrasi Ekonomi Politik di Sumenep Abad ke-19

Tatanan birokrasi ekonomi-politik di Sumenep pada abad ke-19 mencerminkan proyek kolonial Belanda yang bertujuan menata ulang relasi kekuasaan lokal untuk menguasai sumber daya strategis, terutama garam (Sari & Wisnu, 2022). Dalam kerangka ekonomi politik kolonial, birokrasi tidak bersifat netral, tetapi berfungsi sebagai instrumen kekuasaan untuk memastikan pengambilan nilai lebih melalui regulasi produksi, distribusi, dan harga komoditas (Parwoto & Hartono, 2018). Negara kolonial membangun sistem administrasi terpusat di pesisir Jawa dan Madura untuk menundukkan mekanisme pasar lokal pada logika kepentingan pendapatan negara dan stabilitas ekonomi kolonial, sekaligus menciptakan ketergantungan struktural masyarakat pesisir pada institusi negara kolonial (Muflilha et al., 2021). Kebijakan monopolii garam memperlihatkan mekanisme kontrol tersebut secara jelas. Penempatan pejabat keuangan (*ambtenaar van financiën*) di pelabuhan Sumenep untuk memonitor seluruh aktivitas ekspor garam tercatat dalam arsip *De Locomotief: Samarangsche Handels-en Advertentieblad* (17 Juli 1897). Kebijakan ini, dalam perspektif ekonomi politik, merepresentasikan upaya negara kolonial untuk memonopoli aliran komoditas dan informasi sekaligus mengamankan penerimaan keuangan negara (Parwata & Padmo, 1997).

Relasi kuasa yang timpang tercermin dalam kewajiban penyerahan seluruh hasil produksi ke gudang pemerintah (*zoutmagazijn*) dan penetapan harga sepihak oleh negara, yang menempatkan petani dan pedagang lokal sebagai produsen subordinat tanpa kendali atas nilai tukar komoditas yang mereka hasilkan (Hasan et al., 2023). Birokrasi kolonial pada tingkat lokal dioperasikan melalui aparatur pribumi bupati, wedana, asisten demang, dan mantri garam yang dipertahankan secara formal namun secara substantif berada di bawah kendali otoritas Eropa (Widyanti & Setiyanugroho, 2022). Praktik *indirect rule* tercermin dalam pola ini, di mana penguasa lokal menjalankan fungsi sebagai perpanjangan tangan negara kolonial dalam mengawasi produksi dan distribusi komoditas strategis (Rahayu, 2016).

Peran ganda mantri garam sebagai administrator teknis sekaligus mediator kekuasaan dalam industri garam sering memicu ketegangan sosial karena berbenturan langsung dengan kepentingan ekonomi petani (Wahid, 2015). Birokrasi kolonial tidak hanya bersifat represif, tetapi juga adaptif terhadap praktik ekonomi lokal berbasis patronase, sebagaimana ditunjukkan oleh analisis arsip *Soerabaijasch Handelsblad* (18 September 1886). Akses terhadap sistem monopoli dimanfaatkan oleh sejumlah pejabat lokal untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui pengaturan distribusi dan harga. Kekuasaan ekonomi kolonial, seperti yang terlihat dari fenomena ini, beroperasi melalui jejaring sosial hierarkis di mana otoritas administratif, status sosial, dan akses ekonomi saling berinteraksi (Hasan et al., 2023).

Selain menghasilkan penindasan struktural, monopoli garam juga membuka ruang pengumpulan keuntungan terbatas bagi kelompok birokrasi lokal yang berpengaruh. Kesenjangan sosial yang semakin melebar di masyarakat pesisir mencerminkan dampak struktural dari monopoli garam. Transformasi fungsi bangsawan lokal di Sumenep dari pelindung rakyat menjadi agen kolonial yang memperoleh hak istimewa berupa kepemilikan tambak besar, akses kredit, dan izin distribusi (*zoutverkoopvergunning*) dipaparkan oleh (Anas, 2025). Di sisi lain, petani garam kehilangan otonomi produksi dan sepenuhnya bergantung pada jaringan distribusi yang dimonopoli negara dan pejabat lokal (Mahmudah, 2018). Pergeseran struktur sosial tradisional menuju formasi kelas kolonial yang lebih eksloitatif ditandai oleh kondisi ini.

Resistensi ekonomi rakyat muncul sebagai respons terhadap ketegangan akibat ketimpangan tersebut. Penolakan petani di Talango dan Pragaan untuk menyerahkan hasil panen ke gudang pemerintah karena harga yang terlalu rendah tercatat dalam arsip *Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad* (27 Desember 1894). Perlawanan ini, dalam perspektif ekonomi politik, dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan kontrol atas alat produksi dan jaringan distribusi tradisional yang terancam oleh monopoli negara (Mufligha et al., 2021). Bahwa birokrasi kolonial tidak sepenuhnya berhasil menundukkan ekonomi rakyat, melainkan terus dihadapkan pada negosiasi dan perlawanan berbasis komunitas, ditegaskan oleh resistensi tersebut.

Birokrasi ekonomi kolonial di Sumenep tidak hanya mengontrol produksi, tetapi juga berfungsi mengintegrasikan wilayah ini ke dalam jaringan kapitalisme kolonial regional. Fungsi pelabuhan Sumenep dan Kalianget sebagai titik kontrol ekspor dimaksudkan untuk memastikan seluruh komoditas tercatat secara resmi dan tunduk pada regulasi kolonial (Sari & Wisnu, 2022). Temuan Widyanti & Setionugroho (2022) yang menunjukkan keberlanjutan struktur ekonomi kolonial hingga abad ke-20 di mana Madura diposisikan sebagai wilayah produsen bahan mentah berorientasi ekspor dengan nilai tambah rendah sejalan dengan analisis ini.

Arena pertemuan antara kekuasaan kolonial, struktur feodal lokal, dan ekonomi rakyat pesisir terbentuk dalam birokrasi ekonomi-politik di Sumenep abad ke-19. Sebagai mekanisme utama kontrol negara kolonial, monopoli garam sekaligus menghasilkan dampak struktural berupa ketimpangan sosial dan ketergantungan ekonomi (Astutik, 2019). Kendati demikian, berbagai bentuk adaptasi dan resistensi muncul di balik dominasi tersebut, yang menunjukkan daya bertahan masyarakat pesisir dalam menegosiasikan posisinya di dalam sistem ekonomi kolonial yang menekan.

3. Jaringan Perdagangan Garam di Sumenep Abad ke-19

Letak geografis Sumenep yang strategis menjadikannya sebagai titik penting dalam jaringan perdagangan maritim sejak akhir abad ke-18, dengan peran yang semakin signifikan memasuki abad ke-19. Ketersediaan dermaga utama beserta pelabuhan-pelabuhan pendukungnya memfasilitasi Sumenep untuk berperan sebagai penghubung antara kawasan produksi garam di pesisir Madura dengan berbagai pasar antarpulau di wilayah Jawa Timur hingga kawasan timur Nusantara (Qalbiyah & Wijaya, 2024). Perdagangan garam dalam hal ini bukan sekadar aktivitas ekonomi lokal, melainkan bagian integral dari sistem ekonomi maritim kolonial yang menghubungkan produsen, pelabuhan, dan pasar melalui pengaturan pemerintah colonial (Widyanti & Setionugroho, 2022).

Tiga unsur fundamental membentuk struktur jaringan perdagangan garam di Sumenep yaitu aktor ekonomi, jalur distribusi, dan simpul pelabuhan (Raditya, 2020). Jaringan ini digerakkan oleh beragam aktor yang mencakup petani garam sebagai produsen dasar, pengusaha lokal atau *pachter* yang menjembatani transaksi, birokrasi

kolonial yang mengatur sistem perdagangan, dan pelaut Madura yang melaksanakan distribusi (Sari & Wisnu, 2022). Alur distribusi berawal dari lokasi produksi di tambak-tambak pesisir Sumenep Kalianget, Talango, dan area sekitarnya menuju pelabuhan setempat, selanjutnya dikirim ke pelabuhan transit utama seperti Surabaya dan Gresik, bahkan hingga ke wilayah Kalimantan dan Sulawesi melalui sistem pelayaran rakyat (Muflilha et al., 2021). Pelabuhan Sumenep pada abad ke-19 mengembangkan fungsi ganda dalam perspektif teori pelabuhan Leong Sau Heng (1990), yakni sebagai *collecting centre* dan *feeder point*.

Fungsi pertama merujuk pada peran pelabuhan dalam menghimpun garam dari wilayah pesisir Madura bagian timur, sedangkan fungsi kedua berkaitan dengan penyaluran komoditas ke Surabaya yang berstatus sebagai *entrepôt* primer Jawa Timur. Kategorisasi fungsional ini tidak terbatas pada penjelasan aspek teknis operasional pelabuhan semata, namun juga merefleksikan bagaimana Sumenep terposisi dalam tatanan hierarkis kepelabuhanan kolonial yang berkarakter terpusat dan timpang (Zamroni, 2014). Pelabuhan Sumenep semakin terintegrasi ke dalam jaringan kolonial melalui penerapan kebijakan monopoli garam.

Berdasarkan arsip *Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad* (27 Desember 1894) dan penelitian Parwata & Padmo (1997) seluruh hasil garam Madura diharuskan memasuki saluran distribusi resmi dengan pengawasan *Departement van Financiën*. Pelabuhan kemudian berfungsi sebagai titik kontrol pemerintah kolonial, tempat bersinggungannya aliran komoditas, penetapan harga, dan kepentingan perpajakan (Hidayat & Athoillah, 2024). Dalam struktur jaringan ini, negara kolonial berperan sebagai aktor utama yang mendominasi relasi antar-simpul sekaligus membatasi kemandirian ekonomi para pelaku usaha lokal.

Kendati demikian, sistem resmi tidak sepenuhnya menguasai jaringan perdagangan garam Sumenep. Berdasarkan laporan *Soerabaijasch Handelsblad* (18 September 1886), terdapat rute distribusi alternatif yang dioperasikan melalui pelayaran rakyat untuk mengirim garam secara gelap ke Kalimantan dan Sulawesi. Rute perdagangan ini dijalankan dengan memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan kecil dan jejaring sosial yang terjalin di antara pelaut Madura, Bugis, Mandar, dan Tionghoa peranakan (Hasan et al., 2023). Hadirnya jalur informal semacam ini mengindikasikan bahwa jaringan perdagangan memiliki karakter yang adaptif dan berlapis-lapis, dengan relasi antar-titik yang berada di luar kendali penuh otoritas kolonial.



Gambar 2. *Zoutwinning bij Soemene*

(Sumber: KITLV Picture Leiden, 1910)

Zoutwinning bij Soemene KITLV (1910) dalam konteks ini memiliki makna yang melampaui representasi aktivitas produksi garam semata, foto tersebut memperlihatkan tambak garam sebagai simpul awal jaringan perdagangan dan basis ekonomi kawasan pesisir. Kegiatan produksi yang terdokumentasi dalam foto ini menjadi

awal mula dari mata rantai relasi ekonomi yang menjembatani petani, pedagang perantara, pelabuhan, hingga pasar-pasar antarpulau. Oleh karena itu, bukti tersebut memberikan penguatan terhadap analisis mengenai proses integrasi aktivitas produksi lokal ke dalam struktur jaringan perdagangan kolonial yang lebih luas. Jaringan perdagangan garam di Sumenep, jika ditinjau dari kacamata ekonomi politik, memperlihatkan dinamika antara pengendalian kolonial dan respons adaptif komunitas pesisir (Anas, 2025). Di satu sisi, pengaturan izin usaha, supervisi pelabuhan, dan monopoli penetapan harga membangun struktur jaringan yang bertingkat dan timpang di sisi lain, pelayaran rakyat dan transaksi perdagangan informal membuka celah bagi otonomi ekonomi yang berada di luar koridor resmi (Syafi'i, 2013).

Maka dari itu, jaringan perdagangan garam Sumenep pada abad ke-19 tidak dapat dipandang hanya sebagai mekanisme distribusi komoditas, namun lebih tepat dipahami sebagai arena sosial-politik di mana para aktor lokal melakukan negosiasi untuk menentukan posisi mereka dalam konfigurasi ekonomi maritim kolonial (Muflilha, 2021). Dari analisis ini, jaringan perdagangan garam Sumenep menampilkan pola yang jelas terkait pelaku ekonomi yang berlapis-lapis, saluran distribusi yang mencakup jalur resmi maupun alternatif, serta pelabuhan yang berperan ganda sebagai pusat ekonomi dan arena pertarungan kekuasaan (Razy & Mahzuni, 2021). Kajian ini membuktikan bahwa pelabuhan berskala kecil seperti Sumenep mampu mengambil peran strategis dalam dinamika ekonomi kolonial kawasan Asia Tenggara, bukan sekadar berfungsi sebagai titik pengumpulan komoditas, namun juga menjadi tempat resistensi dan penyesuaian diri bagi komunitas maritim Madura.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaringan perdagangan garam di Sumenep pada abad ke-19 terwujud melalui sinergi antara produksi garam kawasan pesisir, pelabuhan yang berperan sebagai titik distribusi, dan pelayaran rakyat yang menjembatani pasar-pasar antarpulau dalam struktur ekonomi maritim kolonial. Secara strategis, pelabuhan Sumenep beroperasi sebagai pusat pengumpulan dan penyaluran yang menyatukan wilayah produksi lokal ke dalam sistem perdagangan regional di bawah kendali pemerintah kolonial melalui kebijakan monopoli garam. Meski demikian, kontrol birokrasi kolonial yang berciri hierarkis dan eksplotatif tidak mampu sepenuhnya mengeliminasi peran pelaku lokal, mengingat petani, pedagang perantara, dan pelaut Madura menciptakan saluran distribusi informal sebagai upaya adaptif untuk memelihara kemandirian ekonomi mereka. Oleh karena itu, permasalahan penelitian mengenai mekanisme operasional jaringan perdagangan garam Sumenep beserta identifikasi para aktor yang berperan di dalamnya terjawab melalui temuan bahwa aktivitas perdagangan garam bukan semata-mata merepresentasikan dominasi kolonial, melainkan juga mengungkapkan dinamika negosiasi, perlawanan, dan elastisitas jaringan sosial-ekonomi komunitas pesisir dalam berhadapan dengan tekanan sistem monopoli.

Daftar Pustaka

- Amaliyah, A. F., & Nugroho, P. (2024). Pengaruh Biaya Produksi Dan Kualitas Terhadap Pendapatan Usaha Garam Di Kabupaten Sumenep. *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 8(2), 23-34.
- Anas, Z. (2025). Pemberdayaan Petani Garam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Kropoh Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep. *Al-Iqtisadiyah: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Islam*, 1(1), 1-11.

- Astutik, M. A., Nurmalina, R., & Burhanuddin, B. (2019). Analisis Status Keberlanjutan Pengusahaan Garam Di Tiga Wilayah Pulau Madura. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 7(1), 13-26.
- Atikurrahman, M., Ilma, A. A., Dharma, L. A., Affanda, A. R., Ajizah, I., & Firdaus, R. (2021). Sejarah Pemberontakan Dalam Tiga Bab: Modernitas, Belasting, Dan Kolonialisme Dalam Sitti Nurbaya. *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 3(1), 1-22.
- Hasan, F., Rizal, M., & Sunyigono, A. K. (2023). Motivasi Petani Garam Dalam Melakukan Usahatani Garam di Desa Pinggir Papas Kecamatan Kaliangget Kabupaten Sumenep. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 20(1), 115-123.
- Hidayat, R., & Athoillah, A. (2024). Hunting For Solomon's Ring In Salt Island: The History Of Hadrami Diaspora In Sumenep, 1832-1901. *Satmata: Journal of Historical Education Studies*, 2(1), 1-16.
- Ismawati, I., Putri, R. D., & Agustina, N. M. (2020). Identifikasi Penyebab Perbedaan Produktivitas Garam Rakyat Di Kabupaten Sumenep. *Journal of Food Technology and Agroindustry*, 2(2), 64-69.
- Jonge, H. D. (2011). *Garam, Kekerasan, Dan Aduan Sapi*. Yogyakarta: LKiS.
- Kuntowijoyo. (2013). *Metode penelitian sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Leong, S. H. (1990). *Collecting Centres, Feeder Points And Entrepôts In The Malay Peninsula, c. 1000 BC-AD 1400*. Singapore: National University of Singapore Press.
- Mahdiyar, F. A., Pribumi, N. S., Nabila, S., & Sapto, A. (2022). Madoera Stoomtram Maatschappij: Fungsi Perkeretaapian Sebagai Pengangkutan Garam Hingga Transportasi Umum Di Madura Tahun 1897-1987. *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, 2(1), 1-12.
- Mahmudah, I. N. A. Y. A. T. U. L. (2018). Perkembangan Kota Sumenep Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1883-1926. *Avatar: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 6(3).
- Mufligha, D. I., Khasanah, A. N., Siddiqy, H. A., Lutfi, A., & Susanto, D. (2021). Perlawanan Petani Garam Madura Terhadap Monopoli Dagang Kolonial Belanda: Tinjauan historis. *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 3(2), 161-170.
- Parwata, S. K., & Padmo, S. (1997). Monopoli garam di Madura 1905-1920. *Berkala Penelitian Pascasarjana*, 10(1997), 1-15.
- Parwoto, P., & Hartono, M. (2018). Dampak Monopoli Garam Di Madura Pada Abad XX. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1), 33-42.
- Qalbiyah, S., & Wijaya, D. N. (2024). VOC Dan Dinamika Kekuasaan Di Sumenep Abad XVIII: Sebuah Tinjauan Historis. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(4), 225-241.
- Raditya, A. (2020). Karakter Orang Madura, Nasionalisme, Dan Globalisasi. *Masyarakat Indonesia*, 46(1), 15-33.
- Rahayu, I. D. (2016). Pergeseran Kesultanan Sumenep Ke Tangan VOC Tahun 1624-1705. *Avatar: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(3).
- Razy, M. R. O. A. (2023). Dinamika Konflik Panembahan Dan Residen: Kebijakan Sistem Irigasi Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Madura (1850-1907). *AGASTYA: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 13(1), 33-46.
- Razy, M. R. O. A., & Mahzuni, D. (2021). Sosial Ekonomi Masyarakat Madura abad XIX-XX: Sebuah Kajian Ekologi Sejarah. *Siginjai: Jurnal Sejarah*, 1(2), 65-79.

- Romdana, R., Syauqi, A., & Latuconsina, H. (2020). Kondisi Lingkungan Dan Persepsi Masyarakat Perairan Tambak Garam di Dusun Ageng Desa Pinggir Papas, Sumenep, Madura. *Jurnal Ilmiah Biosaintropis*, 6(1), 72-81.
- Sari, S. P., & Wisnu, W. (2022). Candu Di Madura Tahun 1894-1949. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 13(1).
- Syafi'i, I. (2013). Persaingan Pengangkutan Garam di Selat Madura 1924-1957. *Citra Lekha: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 17(1), 85-104.
- Utomo, S. J., & Vibriyanto, N. (2024). Pengembangan Model Kelembagaan Ekonomi Petani Garam Pulau Madura. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 5(2).
- Wahid, A. (2015). Dari Sistem Lisensi Ke Monopoli: Politik Ekonomi Garam Di Indonesia Pada Masa Kolonial. *Jurnal Sejarah dan Nilai Budaya*, 3(2).
- Widyanti, R. H. D., & Setiyonugroho, P. (2022). Dynamics Of The Salt Industry In Madura, 1950-1975. *Karmawibangga: Historical Studies Journal*, 4(2), 113-124.
- Yogana, I. P. B., Putra, I. G. S. A., & Parining, N. (2016). Potensi dan proses pemberdayaan Petani Garam di Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. *Journal of Agribusiness and Agritourism*, 165393.
- Zamroni, M. I. (2014). Dinamika Elite Lokal Madura. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 17(1), 30-55.